

AKAR FILOSOFIS DAN IDEOLOGIS KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN¹

oleh:

Arif Rohman²

(email: arif_rohman@uny.ac.id)

Pendahuluan

Jujur harus kita akui bahwa mutu pendidikan di Indonesia secara agregat masih belum menggembarakan. Laporan UNDP tahun 2013 menyebutkan ranking HDI Indonesia berada pada urutan 121 dari 186 negara di dunia, sementara negara tetangga memiliki ranking lebih baik, seperti Singapura (18), Brunai (30), Malaysia (64), Thailand (103), dan Filipina (114). Hasil penilaian kemampuan siswa oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam kegiatan *Programme for International Student Assessment (PISA)*, anak-anak Indonesia menempati ranking 144 dari 145 negara (Kompas, 23 Desember 2013). Meskipun harus diakui bahwa anak-anak Indonesia secara individual seringkali menjuarai dalam berbagai event olimpiade sains dan matematika tingkat internasional, namun secara agregat mutu pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan..

Femonea di atas menegaskan adanya kesalahan internal dalam pengelolaan pendidikan kita. Dari sisi kebijakan pendidikan, paling ada tiga persoalan dasar berkaitan dengan problem pendidikan kita: *pertama*, pola formulasi kebijakan pendidikan yang masih berpusat pada elit dengan sistem *top-down* sementara partisipasi publik relatif diminimalkan. Apalagi praktek budaya birokrasi politik partimomial masih menjadi kebiasaan di era tatanan reformasi demokrasi, sehingga secara struktural birokrasi pendidikan sudah mengalami reformasi demokratis namun secara kultural masih bersifat patrimonial.

Kedua, banyaknya produk kebijakan pendidikan yang sudah dirancang dan diformulasi secara rumit dan mahal ternyata ketika sampai pada tataran implementasi mengalami distorsi dan penyelewengan. Ada distorsi interpretasi dan distorsi orientasi, pun pula ada penyelewengan kalkulasi donasi dan sosialisasi implementasi. Contoh paling nyata adalah dalam kebijakan penyelenggaraan 'sekolah internasional'.

Ketiga, berbagai paket kebijakan inovasi pendidikan hampir selalu diproses serba cepat (*instant*) sehingga kurang mempertimbangkan secara komprehensif berbagai implikasi positif negatifnya. Salah satu contoh paling dekat terhadap hal ini adalah penerapan

¹ Makalah Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2014 di Convention Hall UIN Suka.

² Dr. Arif Rohman, M.Si. adalah staff pengajar pada program studi Kebijakan Pendidikan (KP) jurusan Filsafat dan sosiologi Pendidikan (FSP) Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.

kurikulum 2013 yang dikesankan amat dipaksakan. Akibatnya, hampir paket inovasi kebijakan menjadi sekedar proyek dan involutif belaka.

Dari tiga fenomena di atas, maka setiap kali ada formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan secara akumulatif telah mendorong pada munculnya pandangan skeptis masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat mengeluhkan bahwa seringkali terjadi perubahan kebijakan pendidikan pada kenyataannya belum mampu menghasilkan perbaikan signifikan. Keluhan awam yang sering muncul adalah “*Ganti menteri ganti kurikulum*”. Potret yang demikian menggambarkan sebuah fenomena yang disebut pembangunan semu atau ‘seolah-olah’. Kita sibuk bekerja menyelesaikan aneka masalah namun realitasnya tidak mengubah apa-apa. Hal ini sejalan dengan Mochtar Buchori (1994:12) yang menyebut bahwa pembangunan pendidikan kita belumlah berupa tindakan membangun yang sebenarnya (*genuine development act*) tetapi tindakan membangun semu (*pseudo-development act*) atau tindakan membangun yang bersifat nominalis (*nominal development act*). Ditambahkan Silberman (O’Neil, 2001:8), bahwa kurang berhasilnya perbaikan pendidikan kita selama ini lebih disebabkan sikap dan tindakan ‘tanpa pikir’ aktor kebijakan kita di semua tingkat, atau dengan kata lain, belum kokohnya dasar-dasar filosofis ideologis pendidikan kita.

Dengan mencermati paparan tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah sebuah kebijakan pendidikan bila dilihat dari kerangka akar filosofis dan ideologisnya? Mengapa pilihan terhadap sebuah dasar ideologis terhadap praktek pendidikan menjadi sangat penting?

Akar Filosofis dan Ideologis Kebijakan Pendidikan.

Pada umumnya praktek penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan subyektif berupa preferensi nilai serta prinsip yang dipilih. Aneka pertimbangan subyektif tersebut sebenarnya bisa dimengerti, mengingat praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas motivasi dan orientasi masyarakat, atau istilah yang dipakai oleh Stevens dan Wood (1987: 149) adalah cita-cita sosial (*social ideals*).

Dengan merunut pada pertimbangan motivasi dan orientasi masyarakat atau cita-cita sosial (*social ideals*) di atas, maka praktek penyelenggaraan pendidikan --baik di sekolah maupun luar sekolah—mempunyai peran penting yang berbeda. *Satu sisi*, proses pendidikan dapat melegitimasi terhadap formasi sosial budaya yang ada (*status quo*), *sisi yang lain* pendidikan berperan membangun atau merubah tatanan sosial budaya menuju yang lebih adil.

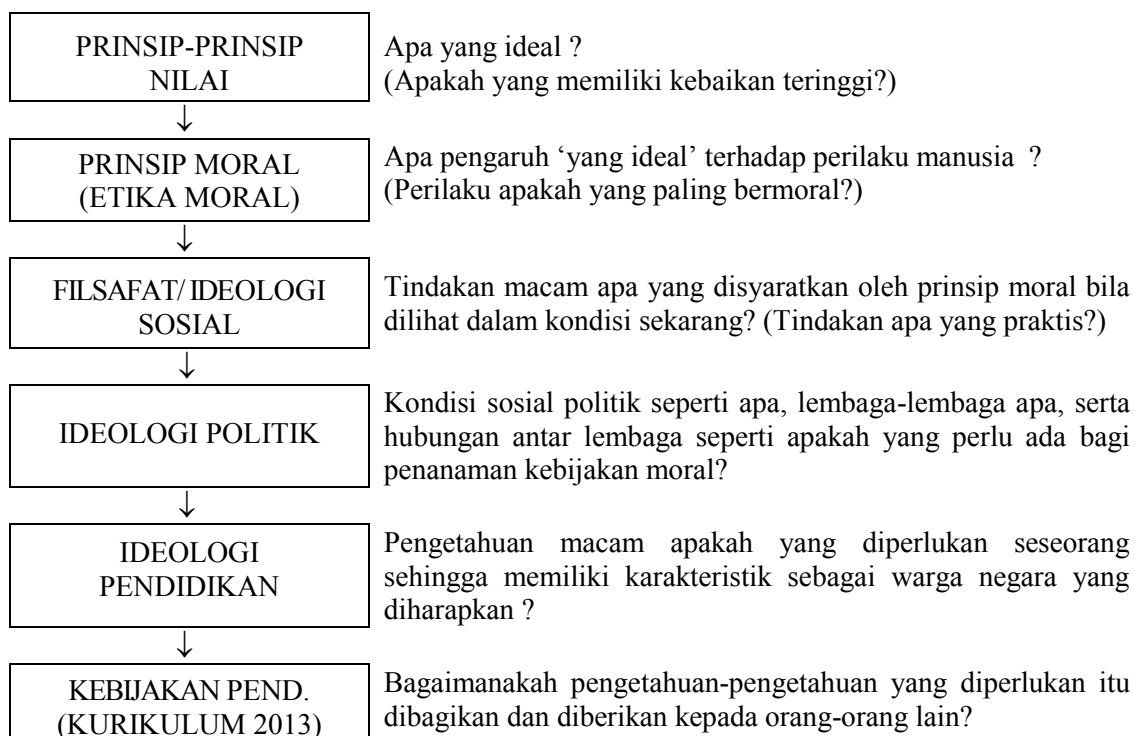
Kedua peran yang berlawanan tersebut sebenarnya merupakan pantulan (*reflection*) dari motivasi dan orientasi serta cita-cita sosial yang berbeda dari masyarakat. Dalam hal ini adalah filosofi dan ideologi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh O’Neil (2001:8) bahwa perbedaan arah penyelenggaraan pendidikan disebabkan oleh perbedaan ideologinya. Karena ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakteristik umum tentang alam dan

masyarakat, serta menjadi panduan perilaku yang bersifat *evaluatif*. Oleh karenanya, ia tidak sekedar memberi informasi tentang dunia tetapi juga merupakan petunjuk yang bersifat *imperatif* bagaimana seharusnya manusia dan masyarakat bertindak.

Prinsip dan petunjuk nilai yang bersifat *imperatif* sekaligus *evaluatif* tersebut pada akhirnya mempengaruhi bagaimana tatanan sosial masyarakat dibangun. Dengan kata lain, ideologi sosial suatu masyarakat mempengaruhi formasi sosial yang hendak diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah tentang Kurikulum 2013 atau kebijakan lainnya merupakan *kebijakan publik* yang diyakini dapat menjadi alat mewujudkan cita-cita ideologi. Selanjutnya kebijakan publik tersebut bersifat umum dan mengikat kepada semua warga masyarakat atau negara, tanpa kecuali. Sebuah kebijakan dikatakan mengikat apabila anggota-anggota masyarakat merasa harus mentaati kewenangan yang ada (Ramlan Surbakti,1992:17). Kebijakan publik yang memiliki daya ikat dan daya paksa terhadap semua warga negara wujudnya banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah kebijakan kurikulum 2014.

Secara hirarkhis skematis, kebijakan pendidikan paling awal didasari oleh nilai dasar yang paling dijunjung tinggi yaitu *prinsip nilai*, kemudian melahirkan *prinsip moral*, dan *prinsip moral* ini melahirkan *kebijakan sosial* yang dalam hal ini adalah *filasafat sosial*, kemudian melahirkan *ideologi politik*, sehingga akhirnya sampai pada terwujudnya *kebijakan pendidikan*. Berikut ini digambarkan hirarkhis skematis alur nilai dari kebijakan pendidikan sebagaimana dibuat O’Neil (2001:42) dengan sedikit penambahan dari penulis:



Beberapa Fahaman Filsafat atau Ideologi Pendidikan

Beberapa fahaman ideologi pendidikan telah banyak dikemukakan para ahli, yang terakhir diantaranya diungkapkan oleh O'Neil (2001). Pemetaan fahaman ideologi pendidikan yang disampaikan O'Neil ini sebenarnya merupakan koreksi atas pemetaan yang telah dibuat oleh Theodore Brameld dalam bukunya *Toward a Reconstructed Philosophy of Education*, (1956). Brameld membagi ada empat macam ideologi pendidikan yang dia sebut sendiri dengan istilah aliran filsafat pendidikan. Keempat ideologi tersebut adalah: *Perennialisme*, *Esensialisme*, *Progresivisme*, dan *Rekonstruktivisme*.

Menurut *Perennialisme*, sasaran yang perlu dicapai dalam pendidikan adalah “kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi dan tak terikat ruang dan waktu”. Ia mengajukan keberadaan pola-pola yang tak bisa berubah dan bersifat universal sejak jaman Yunani kuno sampai, abad pertengahan, dan abad dewasa ini atau sekarang yang melatari dan menentukan seluruh obyek serta peristiwa yang ada dalam kenyataan. Ia berakar dari tradisi filsafat Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas.

Aliran *Esensialisme* berpandangan, bahwa alam semesta beserta segala unsurnya diatur oleh hukum yang mencakup semuanya serta tatanan yang sudah mapan sebelumnya. Karenanya, tugas utama manusia adalah memahami hukum dan tatanan tersebut sehingga mereka bisa menghargai dan menyesuaikan diri dengannya. Menurut esensialisme, sasaran utama sekolah adalah untuk mengenakan siswa kepada karakter dasar alam semesta yang sudah tertata. Oleh karena itu, anak harus dikenalkan kepada warisan budaya sekaligus sebagai pelestari budaya.

Progresifisme berpendapat, tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis, yang membuat siswa lebih efektif dalam menghadapi dan memecahkan problem dalam kehidupan sehari-hari. Progresifisme menekankan pendidikan harus bersifat duniawi, eksperimentatif, eksploratif, aktif, dan evolusioner. Sehingga ia sering disebut fahaman *eksperimentalisme*. Fahaman ini ditopang oleh filsafat Pragmatisme Amerika.

Sedangkan fahaman *Rekonstruktivisme* menekankan bahwa sekolah semestinya diabdikan kepada pencapaian tatanan sosial yang demokratis. Orientasi utama sekolah haruslah pembangunan masyarakat.

Namun, akibat dari adanya beberapa kejanggalan atas pembagian ideologi pendidikan yang dilakukan oleh Brameld, terutama berkaitan dengan dasar penggolongan. Maka William F. O'Neil mengajukan secara berbeda. Dalam hal ini O'Neil (2001:24-25) mengkritik teori penggolongan ideologi pendidikan dari pendahulunya itu memiliki empat kelemahan utama: *pertama*, bahwa penggolongan yang telah dibuatnya hanya tepat untuk menggambarkan fenomena ideologi pendidikan tahun limapuluhan.

Kedua, Brameld terlalu menyederhanakan kekayaan dan keragaman di dalam wilayah filsafat/ ideologi pendidikan kontemporer. *Ketiga*, dasar penggolongan yang dipakai Brameld tidak sejajar. Perbedaan *perennialisme*, *esensialisme*, dan *progresifisme* didasarkan

atas ‘*apa tujuan pendidikan?*’ dan ‘*apa yang musti diajarkan?*’. Sedangkan rekonstruksionisme menekankan dasar penggolongannya pada ‘*apa hubungan yang tepat antara sekolah dengan masyarakat?*’

Adapun kelemahan *keempat* pada teori penggolongan Brameld adalah belum adanya penjelasan kuat tentang keterkaitan antara aliran filsafat pendidikan dengan aliran filsafat. Misalnya tidak semua pragmatis pasti eksperimentalis dan tidak semua konservatis selalu esensialis.

Oleh karena itu O’Neil (2001: 99-129) membuat penggolongan baru yang lebih longgar yang meliputi tiga macam ideologi pendidikan, yaitu: *konservatisme*, *liberalisme*, dan *kritisisme*.

Ideologi Konservatif

Faham ideologi ini memandang, bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah. Perubahan sosial bagi penganut faham ini bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang paling klasik, kaum konservatif berkeyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau paling tidak mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna dibalik semua itu. Dengan demikian, kaum konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka.

Dalam pandangan kaum ini, mereka yang menderita --seperti mereka yang termasuk kelompok miskin, buta huruf, tertindas, gelandangan-- menjadi demikian disebabkan karena kurang beruntung. Kaum miskin dan kurang beruntung tadi haruslah bersabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Kaum konservatif sangat menjunjung tinggi harmoni serta menghindari konflik.

Ideologi Liberal

Penganut ideologi ini berangkat dari keyakinan bahwa dalam masyarakat terjadi banyak masalah termasuk urusan pendidikan, namun masalah dalam pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Sehingga tugas pendidikan tidak ada sangkut pautnya persoalan *politik* dan *ekonomi*. Namun demikian, proses pendidikan tidak boleh lepas sama sekali dengan kondisi-kondisi eksternal, dalam hal ini *ekonomi* dan *politik*. Pendidikan harus bisa *menyesuaikan diri* terhadap kondisi-kondisi external tersebut, dengan cara memecahkan berbagai masalah internal melalui mereformasi diri secara ‘kosmetik’.

Misalnya melalui pengadaan sarana prasarana yang memadai (ketercukupan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium yang canggih, dan peralatan komputer yang komplit), menyeimbangkan rasio murid-guru, inovasi metode pembelajaran baru (CBSA, modul, *remedial teaching*, *learning by doing*, *experiential learning*, dll), penataan manajemen sekolah (MBS, *competency based leadership*, dll).

Penganut ideologi konservatif dan liberal, memandang sama bahwa pendidikan adalah apolitik dan kemajuan haruslah merupakan target utama pendidikan. Kaum liberal terutama tidak melihat kaitan pendidikan dalam struktur kelas dan dominasi politik, budaya, serta gender. Bahkan pendidikan --menurut *fungsiionalisme struktural* (salah satu sekte dalam ideologi liberal)-- justru dimaksud sebagai sarana untuk menstabilkan nilai dan norma masyarakat. Pendidikan merupakan media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai tata susila dan keyakinan agar sistem masyarakat secara luas berfungsi baik.

Liberalisme berakar pada cita-cita *individualisme* Barat. Menurut cita-cita ini gambaran manusia ideal adalah manusia '*rasionalis liberal*'. Yakni, semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektual; baik tatanan alam maupun sosial dapat ditangkap oleh akal; serta individu-individu di dunia adalah *atomistik* dan *otonom*. Ideologi liberalisme ini juga dipengaruhi oleh *positivisme*. Seperti pendewaan terhadap '*scientific method*' serta adanya pemisahan antara fakta dengan nilai menuju pemahaman obyektif.

Ideologi Kritis

Pendidikan bagi kaum kritis ini merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi kaum konservatif, pendidikan diarahkan untuk menjaga status quo, sedang kaum liberal pendidikan diorientasikan untuk perubahan moderat; maka ideologi kritis ini menghendaki pendidikan sebagai sarana perubahan struktural secara fundamental dalam *politik, ekonomi, serta gender*. Bagi kaum kritis, diskriminasi kelas serta gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Sehingga kaum kritis memiliki kehendak berbeda dengan kaum liberal, bagi kaum liberal pendidikan harus terlepas dari persoalan kelas dan gender dalam masyarakat, namun kaum kritis menghendaki melekat dengannya.

Paham kritis melihat, perhatian utama pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap '*the dominant ideology*' ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang berfikir serta bertindak untuk selalu kritis terhadap keadaan sistem serta struktur yang tidak adil dan menindas. Pendidikan tidak mungkin bisa bersikap *netral, obyektif, dan mengambil jarak* dengan masyarakat. Maka visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan beserta kelas dominan yang ada sebagai perwujudan atas pemihakan terhadap rakyat kecil, kelompok miskin, atau kelas tertindas umumnya dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil.

Dilihat dari ketiga ideologi pendidikan di atas, nampaknya para penentu kebijakan pendidikan di Indonesia masih terkesan samar-samar dalam memilih dan mendasarkan diri sebagai basis ideologis dalam setiap kebijakannya. Apologi yang muncul dari mereka biasanya mengatakan telah mendasarkan diri atas ideologi Pancasila. Pemakaian ideologi Pancasila belum terinfiltrasi secara mantap ke dalam setiap kebijakan pendidikan. Ideologi Pancasila hanya sebatas symbol, namun substansinya masih dipertanyakan. Akibatnya, basis ideologis yang digunakannya menjadi kabur.

Oleh karenanya, sangat wajar bahwa terhadap keseluruhan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah cenderung bersifat *involutif* bahkan terkesan mengulang-ulang atau *blunder*. Bahkan yang paling menyedihkan adalah banyak kebijakan pendidikan yang dibuat

oleh mereka demi memuaskan kelompok kepentingan tertentu bukan kepada pemberdayaan bangsa secara keseluruhan.

Bagaimana Nasib Kurikulum 2013

Kurikulum pendidikan tahun 2013 diformulasi untuk menyiapkan anak didik sebagai generasi bangsa di masa depan yang lebih baik. Ia disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh karenanya, bagaimanakah mengupayakan agar sumberdaya insani penduduk usia produktif yang melimpah dapat ditransformasikan menjadi memiliki kompetensi dan keterampilan memadai melalui pendidikan.

Adapun tantang eksternal antara lain adalah adanya arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari tradisional-agraris menjadi modern-industrial dalam berbagai wadah misalnya *World Trade Organization (WTO)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-sains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan juga menjadi tantangan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International misalnya TIMSS dan PISA sejak tahun 1999 juga menunjukkan hasil anak Indonesia yang kurang baik. Terhadap hal semua di atas, pada akhirnya dibuatkan solusi inovasi kebijakan pendidikan yaitu perubahan kurikulum pendidikan menjadi kurikulum baru tahun 2013.

Secara filosofis Kurikulum 2013 mendasarkan diri pada empat faham filsafat pendidikan secara keseluruhan, yaitu *perennialisme*, *esensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruktivisme*. Hal ini dapat kita cermati dari dokumen kurikulum 2013 yang termuat di dalam lampiran Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI, yaitu:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi

muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah social di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Namun sayangnya, kurikulum 2013 tersebut kurang secara jelas menyebut ideologi Pancasila. Dengan demikian kurikulum ini tidak terlihat semangat ke-Indonesiaan karena mengesampingkan Pancasila sebagai salah satu karakter dasar bangsa Indonesia. Kurikulum 2013 diyakini banyak ahli kurang melibatkan komponen utama pendidikan, yaitu guru. Guru dan sekolah lebih banyak didudukkan sebagai pelaksana dari kurikulum tersebut. Dengan demikian, kurikulum ini bersifat elitis-sentralistik, kurang populis-partisipatif.

Menuju Formulasi Kebijakan Pendidikan Kritis-Partisipatif

Dengan mendasarkan diri pada filsafat sosial yang berlanjut kepada filsafat dan ideologi politik sebagaimana dijelaskan di muka, maka terdapat implikasi beragamnya teori berkenaan dengan formulasi kebijakan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pemberlakuan Kurikulum 2013. Secara teoritis, ada lima pendekatan dalam formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan : (a) teori *radikal*, (b) teori *advokasi*, (c) teori *transaktif*, (d) teori *sinoptik*, dan (e) teori *incremental*.

Teori radikal (*radical theory*) menekankan kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan yang menyangkut penyelenggaraan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah diserahkan kepada daerah. Sehingga negara atau pemerintah pusat tidak perlu repot-repot menyusun sebuah rencana kebijakan pendidikan bila pada akhirnya kurang sesuai dengan kondisi lokal. Lebih-lebih kondisi masing-masing daerah memiliki tingkat keragaman dan kekhasan sendiri-sendiri yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Asumsi dari teori ini adalah '*tidak ada lembaga atau organ pendidikan lokal yang persis sama satu sama lain*'. Untuk itu, untuk menyusun kebijakan pendidikan yang terbaik adalah diserahkan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga lokal yang secara hakiki memiliki karakteristik yang relatif plural, serta yang mengetahui persoalan riil bagi dirinya.

Teori advokasi (*advocacy theory*) agak berbeda dengan teori radikal di atas. Teori advokasi ini tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan seperti karakteristik lembaga, lingkungan sosial dan kultural, lingkungan geografis, serta kondisi lokal lainnya. Kesemua macam corak karakteristik dan perbedaan lingkungan tersebut menurut teori ini hanyalah perbedaan yang didasarkan pada pengamatan empirik semata. Sebaliknya, teori advokasi ini lebih mendasarkan pada argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional demi kepentingan umum, serta demi melindungi lembaga-lembaga dan organ-organ pendidikan yang relatif masih marginal dibanding lembaga atau organ pendidikan lain yang sudah maju.

Teori transaktif (*transactive theory*) menekankan bahwa perumusan kebijakan sangat perlu didiskusikan secara bersama terlebih dahulu dengan semua pihak. Proses pendiskusian ini perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini adalah dengan personalia lembaga pendidikan di tingkat lokal. Hasil dari proses diskusi tersebut kemudian disosialisasikan secara perlahan. Teori ini sangat menekankan harkat individu dan menjunjung tinggi kepentingan masing-masing pribadi. Keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai individu diteliti satu persatu dan diajak bersama dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Teori sinoptik (*synoptic theory*) lebih menekankan bahwa dalam menyusun sebuah kebijakan supaya menggunakan metode berfikir sistem. Obyek yang dirancang dan terkena kebijakan, dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dengan tujuan yang sering disebut dengan '*misi*'. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut *teori sistem*, atau *teori pendekatan sistem rasional*, atau *teori rasional komprehensif*.

Teori inkremental (*incremental theory*) adalah teori yang menekankan pada perumusan kebijakan pendidikan yang berjangka pendek serta berusaha menghindari perencanaan kebijakan yang berjangka panjang. Penekanan semacam ini diambil disebabkan karena masalah-masalah yang dihadapi serta performa dari para personalia pelaksana kebijakan dan kelompok yang terkena kebijakan sulit diprediksi. Setiap saat, setiap tahun, dan setiap periode waktu mengalami perubahan yang sangat kompleks. Amatlah sulit dan amatlah kurang cermat manakala sebuah kebijakan pendidikan yang berdimensi jangka panjang akan diterapkan pada suatu keadaan yang selalu berubah. Kebijakan pendidikan yang paling tepat adalah kebijakan yang berjangka pendek dan tentatif.

Dari semua teori yang dipaparkan di atas, tentu masing-masing memiliki kekhasan dan implikasi positif dan negatifnya sendiri-sendiri bila diterapkan. Ia hanya akan tepat atau memiliki banyak nilai positif manakala diterapkan pada konteks masalah yang relevan. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa satu masalah akan bisa dipecahkan dengan menggunakan beberapa teori secara *eklektis-sinergis*. Dengan menggunakan teori secara eklektis-sinergis maka partisipasi lokal dan masyarakat pada umumnya diharapkan bisa meningkat secara signifikan serta daya kritis mereka dalam mempertimbangkan antara tuntutan dengan kemampuan juga akan semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Mochtar. 1994. *“Pendidikan dan Pembangunan”*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- O’Neil, William F. 2001. *“Ideologi-Ideologi Pendidikan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Arif. 2002. *“Kebijakan Pendidikan: Ideologi, Proses Politik, dan Peran Birokrasi dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan”*. (Naskah buku yang sekarang sedang proses editing untuk penerbitan di Pustaka Pelajar Yogyakarta).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stevens, Edward and Wood, George H. 1987. *“Justice, Ideology, and Education”*. New York: Random House.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Suryadi, Ace dan Tilaar, HAR. 1994. *“Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *“Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”*. Jakarta: Bumi Aksara.